



Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Nur Dahyanti^{1*}, Sylvi Marsella Diastami², Azra Humaira³, Tengku Darmansah⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: ynurda62@gmail.com¹, silvimarsella9@gmail.com², areumhumaira@gmail.com³,
tengkudarmansah@gmail.com⁴

*Korespondensi penulis: ynurda62@gmail.com

Abstract. Education is one of the main pillars in human resource development in Indonesia, however the quality of education still faces various challenges, such as unequal access and low quality of teaching. This research aims to analyze the education policies that have been implemented by the government in an effort to improve the quality of education in Indonesia. Through a qualitative approach, policy analysis is carried out to identify factors that influence policy effectiveness and its impact on society. The results of the analysis show that although there are programs such as compulsory education and increasing teacher competency, the gap between the policies formulated and their implementation is still a major problem. Therefore, a more inclusive and participatory approach is needed in formulating education policies to ensure that every policy taken is able to answer local needs and improve the overall quality of education.

Keywords: Analysis, Education, Policy.

Abstrak. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, namun kualitas pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakmerataan akses dan rendahnya kualitas pengajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan yang telah diterapkan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, analisis kebijakan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan serta dampaknya terhadap masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat program-program seperti wajib belajar dan peningkatan kompetensi guru, kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya masih menjadi masalah utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam perumusan kebijakan pendidikan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan lokal dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Kata Kunci: Analisis, Pendidikan, Kebijakan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, kualitas pendidikan sering kali menjadi sorotan, terutama dalam konteks mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun telah banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, berbagai tantangan masih mengemuka, seperti ketidakmerataan akses, rendahnya kualitas pengajaran, serta kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dalam konteks ini, analisis kebijakan pendidikan menjadi sangat penting untuk memahami langkah-langkah yang telah diambil dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Received: November 19, 2024; Revised: Desember 08, 2024; Accepted: Desember 24, 2024; Published: Desember 27, 2024

Kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi. Sejak era reformasi, pemerintah telah menerapkan berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi masalah pendidikan, termasuk kebijakan wajib belajar, peningkatan kompetensi guru, dan renovasi infrastruktur sekolah. Namun, efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut sering kali dipertanyakan, terutama dalam hal implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan yang ada, guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mengatasi problematika pendidikan.

Salah satu fokus utama dalam analisis kebijakan adalah pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, faktor-faktor ini dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Misalnya, alokasi anggaran pendidikan yang tidak merata dapat berpengaruh besar pada kualitas pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, dukungan dari pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan.

Selanjutnya, analisis kebijakan pendidikan juga perlu mempertimbangkan perspektif partisipatif, di mana suara dan kebutuhan masyarakat harus diakomodasi. Masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pendidikan, yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Melalui analisis kebijakan yang komprehensif ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi problematika pendidikan di Indonesia. Dengan memahami berbagai aspek yang mempengaruhi kebijakan dan melibatkan masyarakat, kita dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa.

Konsep Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup berbagai aspek yang berkontribusi terhadap pengalaman belajar peserta didik. Secara umum, kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan sistem pendidikan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan peserta didik, masyarakat, serta negara. Kualitas ini tidak hanya diukur dari hasil akademik, tetapi juga mencakup pengembangan karakter, keterampilan, dan sikap sosial peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman tentang kualitas pendidikan harus melibatkan berbagai dimensi yang saling terkait.

Salah satu dimensi penting dalam kualitas pendidikan adalah relevansi kurikulum. Kurikulum yang baik harus mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pasar kerja. Di Indonesia, kurikulum sering kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa kurikulum tersebut tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Relevansi kurikulum menjadi kunci untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global.

Selain kurikulum, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh kompetensi guru. Guru sebagai pengajar memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran. Kualitas pengajaran yang baik sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menyampaikan materi, mengelola kelas, dan memberikan bimbingan kepada siswa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan profesional guru dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Fasilitas dan infrastruktur pendidikan juga merupakan faktor penentu dalam kualitas pendidikan. Sekolah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium, dan akses teknologi informasi, dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di Indonesia, masih terdapat banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, yang kekurangan fasilitas dasar. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Selanjutnya, partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan juga berkontribusi terhadap kualitas pendidikan. Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak, seperti

mendukung kegiatan belajar di rumah dan berkomunikasi dengan guru, dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Selain itu, dukungan masyarakat dalam bentuk program-program pendidikan, beasiswa, dan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan demikian, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas.

Akhirnya, evaluasi dan akuntabilitas dalam sistem pendidikan juga menjadi aspek penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Proses evaluasi yang sistematis dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan. Selain itu, akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk pemerintah, sekolah, dan guru, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang diterapkan benar-benar berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, konsep kualitas pendidikan harus dipahami sebagai suatu sistem yang kompleks dan dinamis, yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk mencapainya.

Kebijakan Pendidikan Di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di negara ini. Sejak era reformasi, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Kebijakan pendidikan yang diterapkan mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, peningkatan kompetensi guru, hingga pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

Salah satu kebijakan penting dalam pendidikan di Indonesia adalah program wajib belajar. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan dasar yang memadai. Dalam implementasinya, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jumlah sekolah, terutama di daerah terpencil, serta memberikan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah masih adanya kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda.

Selain itu, kebijakan peningkatan kualitas guru juga menjadi fokus utama dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pelatihan dan

sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi guru. Hal ini penting karena guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran. Dengan meningkatkan kualitas pengajaran, diharapkan siswa dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa pelatihan yang diberikan benar-benar relevan dan dapat diterapkan di lapangan.

Kurikulum pendidikan di Indonesia juga mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum 2013, misalnya, dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa secara holistik, termasuk aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Namun, implementasi kurikulum ini sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman guru dan keterbatasan sumber daya.

Akhirnya, evaluasi dan akuntabilitas dalam kebijakan pendidikan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang diterapkan untuk mengetahui efektivitas dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Selain itu, akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan pendidikan di Indonesia harus terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Model penelitian ini menggunakan library research, dengan analisis inductive deduktif yang berasal dari beberapa analisis literature (O'Dwyer & Bernauer, 2013; Moser & Korstjens, 2018). Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan(library research) sebagai proses understanding dari data teks tersebut, penulis kemudian menginterpretasikannya menggunakan metode deskripsi analisis, yakni dimulai dengan pengumpulan data secara sistematis dan konsisten, yang kemudian dianalisis, diseleksi serta digabungkan untuk kemudian diambil kesimpulan menggunakan analisis yang deduktif, dari masalah yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan bersifat khusus. Sedangkan sumber data yang dipergunakan yaitu data primer sebagai penguat dan

pelengkap data-data yang dirasa valid dan data sekunder yaitu berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dalam judul penelitian. Sumber data yang digunakan adalah berasal dari Jurnal dan buku diantaranya di tulis oleh Azis dkk., 2017. dkk., 2019, Parsons, Wayne. 2006, Sabri dkk., 2013, Muhdi dkk., 2017, dan sumber lainnya yang relevan. Sedangkan metode analisis dan interpretasi data yang digunakan oleh peneliti mengacu pada langkah-langkah analisis yang diajukan oleh Creswell (2016), Pertama, Memproses dan menyiapkan data untuk ditinjau; Kedua, membaca seluruh data; Ketiga, Mulai mengkode semua data penelitian; Keempat, mendeskripsikan kategori dan pengaturan tema yang akan dianalisis; Kelima, Menyajikan laporan naratif kualitatif, dan Keenam, Membuat interpretasi dalam penelitian kualitatif.

3. HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum Problematika Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Namun, meskipun telah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, berbagai permasalahan masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Terlepas dari kenyataan bahwa pendidikan sangat penting untuk kehidupan, tidak semua orang memiliki dedikasi yang sama untuk memajukan pendidikan, terutama dedikasi para pemimpin terhadap pentingnya pendidikan (Tintington Josly Yakob, dkk. 2023; 804).

Problematika adalah berasal dari akar kata bahasa inggris “problem” artinya, soal, masalah atau teka-teki. Tentang pendidikan banyak definisi yang berbagai macam, namun secara umum ada yang mendefinisikan bahwa pendidikan adalah hasil dari suatu peradaban sebuah bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri, sebagai pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka berkembang. Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan adalah, persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh dunia pendidikan (Sumiati Tuti. 2011).

Saat ini masyarakat Indonesia lebih membutuhkan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Secara garis besar menurut Bustan (2022; 573) ada beberapa masalah yang mendasar dalam pendidikan kita yakni; sistem pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara maju, dengan kualitas yang rendah menjadi tantangan signifikan. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan adalah langkah krusial untuk kemajuan sistem ini. Sinergi antara masyarakat dan

pemerintah sangat penting dalam membangun pendidikan yang lebih baik. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan sumber daya manusia yang kompeten akan mendukung keberhasilan sistem pendidikan di tanah air.

Selain itu, kualitas guru yang rendah dan kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja juga menghambat perkembangan pendidikan. Tantangan sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi perkembangan pendidikan, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi dan hambatan dalam pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan ketidakmerataan dalam kesempatan belajar. Terkait dengan hal ini masih banyak sekolah yang kurang memadai sehingga sekolah tersebut jauh tertinggal dengan sekolah lain contohnya seperti di pedesaan terpencil. Lalu, krisis moral atau pendidikan karakter yang semakin hancur. Di Indonesia kejujuran sepertinya “intan berlian” yang sangat mahal harganya dan dengan mudah dapat diperjual belikan (Bustan. 2022)

Saat ini, dominasi politik praktis dalam pendidikan nasional juga menunjukkan bahwa partai politik telah mengintegrasikan pendidikan ke dalam persaingan kekuasaan mereka. Tujuan pendidikan kini tidak lagi untuk mengembangkan manusia Indonesia secara utuh, melainkan untuk memperkuat kepentingan partai politik tertentu. Lebih memprihatinkan, saat otonomi daerah dilaksanakan bersamaan dengan kemandirian instruktif, banyak kepala daerah yang lebih mengutamakan subjektivitas daripada objektivitas dalam penempatan individu yang kompeten di bidang pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi kepemimpinan daerah berdampak pada pendidikan daerah (Suhariadi et al. 2023).

Setiap kali terjadi pergantian menteri, sering kali kurikulum pendidikan juga mengalami perubahan. Latar belakang pendidikan menteri berpengaruh pada orientasi kurikulum yang diterapkan. Penyesuaian program pendidikan dianggap wajar, karena diyakini dapat meningkatkan relevansi dan kemampuan menghadapi tantangan global. Namun, masalah muncul ketika elemen humanisme tidak diintegrasikan dengan baik dalam kurikulum. Selain itu, perubahan ini menambah beban finansial bagi orang tua terkait biaya pendidikan sekolah.

Dengan berbagai permasalahan ini, Indonesia perlu terus berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan zaman. Upaya perbaikan yang holistik, termasuk pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas pengajaran, dan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan dunia kerja, sangat diperlukan agar pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing di tingkat global dan dapat

berperan serta. Upaya kolaboratif dari pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi isu-isu ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik.

Analisis Kebijakan yang telah Ditetapkan di Indonesia

Analisis kebijakan adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk menyiarkan, merumuskan, dan memahami kebijakan publik yang ada atau yang diusulkan. Tujuan dari analisis kebijakan adalah untuk memberikan rekomendasi yang didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan mengenai berbagai pilihan kebijakan, serta meyakinkan yang mungkin timbul dari pilihan-pilihan tersebut. Analisis ini mencakup berbagai tahap, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, pengembangan kebijakan alternatif, hingga penilaian tentang kemungkinan hasil yang akan dicapai masing-masing.

Analisis kebijakan yang telah ditetapkan di Indonesia bertujuan untuk memahami berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Indonesia, sebagai negara dengan beragam tantangan sosial, ekonomi, dan politik, sering kali mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut serta memperkuat struktur pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui analisis kebijakan, kita dapat memahami sejauh mana kebijakan yang diambil pemerintah berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, serta efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, analisis kebijakan juga memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, seperti dinamika politik, kebutuhan sosial, serta kemampuan sumber daya yang ada. Dengan memahami kebijakan yang telah ditetapkan, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas kebijakan di masa depan demi kemajuan pendidikan di masa depan.

Melakukan analisis kebijakan publik bukan hanya sekadar mengamati kebijakan dan komponen-komponennya, tetapi juga melibatkan proses perancangan dan pengembangan alternatif-alternatif yang mungkin muncul dari kebijakan tersebut. Kegiatan ini dapat diperluas melalui penelitian yang memberikan penjelasan atau perspektif mengenai masalah yang perlu diantisipasi, sehingga penelitian evaluasi dapat diterapkan. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan menjadi penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program-program tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Analisis kebijakan bukan lah hal yang utama dalam proses

pengambilan kepentingan namun menjadi hal penting dikarenakan merupakan bagian dari proses penilaian lembaga tersebut. (Safitri Ulandari, dkk. 2021;74). Berikut adalah analisis mengenai kebijakan yang telah ditetapkan di Indonesia yaitu: Kebijakan Pendidikan, contoh kebijakannya: Kartu Indonesia Pintar (KIP).

- 1) Tujuan: KIP bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin dengan memberikan bantuan biaya pendidikan.
- 2) Analisis: Kebijakan ini efektif dalam mendorong angka partisipasi pendidikan di kalangan anak-anak kurang mampu. Namun, masalah yang masih muncul adalah kualitas pendidikan yang tidak merata di berbagai daerah. Terdapat ketimpangan antara pendidikan di kota besar dan daerah terpencil, serta kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di beberapa tempat.
- 3) Alternatif Solusi: Pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dengan peningkatan fasilitas, pelatihan guru, dan penerapan teknologi pendidikan di daerah terpencil.

Kesenjangan Antara Kebijakan dan Implementasi dalam Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan sering kali menjadi salah satu fokus utama kebijakan pemerintah, terutama karena pendidikan dianggap sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Namun, dalam realitasnya, kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya sering kali terjadi. Hal ini tampak jelas di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kesenjangan ini mengakibatkan kebijakan pendidikan yang dirancang dengan baik di tingkat pusat tidak selalu mampu memberikan dampak positif secara merata di tingkat lokal.

Kesenjangan kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai perbedaan antara visi, tujuan, atau sasaran yang tertuang dalam kebijakan pendidikan dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, program pemerintah seperti Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Namun, di beberapa daerah terpencil, kebijakan ini sulit terealisasi akibat berbagai hambatan, seperti kurangnya fasilitas sekolah, minimnya tenaga pendidik berkualitas, atau kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), kesenjangan implementasi kebijakan pendidikan disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara isi kebijakan, kondisi lingkungan, dan

kapasitas organisasi pelaksana. Dalam konteks pendidikan, ini mencakup faktor teknis, sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi proses implementasi.

Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi dalam pendidikan memiliki dampak yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan:

- 1) Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan: Anak-anak di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak di perkotaan.
- 2) Rendahnya Literasi dan Kompetensi: Kurangnya implementasi kebijakan yang efektif dapat berdampak pada rendahnya tingkat literasi, numerasi, dan keterampilan siswa.
- 3) Tingginya Angka Putus Sekolah: Kegagalan dalam menyediakan fasilitas dan dukungan pendidikan yang memadai dapat memaksa siswa untuk berhenti sekolah, terutama di daerah miskin.
- 4) Melemahnya Kepercayaan Publik: Ketika kebijakan pendidikan tidak memberikan dampak nyata, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

Penyebab Kesenjangan Kebijakan Pendidikan

Beberapa faktor utama penyebab kesenjangan kebijakan pendidikan meliputi:

a. Perencanaan yang Tidak Inklusif

Kebijakan pendidikan sering kali dirancang di tingkat pusat tanpa mempertimbangkan kondisi lokal. Misalnya, kebijakan digitalisasi sekolah, seperti program Merdeka Belajar, membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai. Namun, banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki akses internet, listrik, atau perangkat teknologi pendukung.

b. Keterbatasan Sumber Daya

Minimnya anggaran pendidikan di tingkat daerah sering kali menjadi hambatan utama. Meskipun anggaran pendidikan nasional telah dialokasikan sebesar 20% dari APBN, distribusi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut di tingkat lokal sering kali tidak merata. Selain itu, jumlah guru yang kurang, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), menambah berat tantangan implementasi kebijakan pendidikan.

c. Ketimpangan Infrastruktur

Perbedaan signifikan antara fasilitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan kebijakan pendidikan. Banyak sekolah di daerah

terpencil tidak memiliki ruang kelas yang memadai, laboratorium, perpustakaan, atau bahkan fasilitas dasar seperti toilet yang layak.

d. Kurangnya Pelatihan dan Dukungan untuk Guru

Kualitas implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kapasitas tenaga pendidik. Namun, banyak guru tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk memahami dan menerapkan kebijakan baru, seperti kurikulum berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis proyek dalam program Merdeka Belajar.

e. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang lemah mengakibatkan pelaksanaan kebijakan pendidikan sering kali tidak terpantau dengan baik. Akibatnya, permasalahan di lapangan tidak cepat terdeteksi, sehingga solusi yang diberikan sering kali terlambat atau tidak relevan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Berbagai faktor dapat memengaruhi kualitas pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, faktor-faktor tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, infrastruktur pendidikan, kurikulum, partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan pemerintah.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas pendidikan adalah kompetensi guru. Guru yang berkualitas memiliki kemampuan pedagogis, profesionalisme, dan keahlian di bidangnya yang memadai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh UNESCO, pelatihan guru yang berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Kurangnya pelatihan bagi guru sering kali menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil

Faktor-faktor tersebut meliputi kompetensi guru, infrastruktur, kurikulum, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

- 1) Kompetensi guru. Guru yang memiliki keahlian pedagogik, profesionalisme, dan wawasan yang luas berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan proses belajar-mengajar. Menurut penelitian oleh Suyanto (2009), peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu guru menghadapi tantangan pembelajaran di abad ke-21.

Namun, Suyanto juga mencatat bahwa masih banyak guru di Indonesia yang belum mendapatkan akses pelatihan memadai, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)

- 2) Ketersediaan infrastruktur pendidikan. Fasilitas belajar seperti ruang kelas, laboratorium, dan akses teknologi menjadi pendukung utama keberhasilan pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Sutjipto (2007), menunjukkan bahwa sekolah dengan fasilitas yang memadai cenderung menghasilkan siswa dengan prestasi lebih baik. Namun, disparitas akses terhadap infrastruktur ini masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah pedalaman.
- 3) Kurikulum juga memainkan peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman mampu mendorong peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Menurut Djemari Mardapi (2018), kurikulum yang terlalu padat tanpa mempertimbangkan kemampuan siswa sering kali menjadi penghambat proses pembelajaran. Ia merekomendasikan agar kurikulum nasional lebih fleksibel dan terintegrasi dengan konteks lokal.
- 4) Keterlibatan masyarakat, terutama orang tua, turut memengaruhi kualitas pendidikan. Ratna Megawangi (2004), pendiri konsep pendidikan berbasis karakter, menekankan pentingnya peran orang tua dalam membangun nilai-nilai positif pada anak. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pendidikan juga dapat membantu anak mencapai prestasi yang lebih baik.

Kebijakan pemerintah menjadi faktor yang tidak kalah penting. Muhadjir Effendy (2019), mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, menyatakan bahwa program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru telah memberikan dampak positif pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Namun, ia juga mengakui bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efisien dan merata.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Permasalahan seperti ketidakmerataan akses pendidikan, rendahnya kualitas pengajaran, dan kurangnya infrastruktur yang memadai

menjadi isu sentral yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan. Kebijakan seperti wajib belajar dan peningkatan kompetensi guru telah diterapkan, namun efektivitasnya sering kali terbentur oleh faktor-faktor eksternal, seperti dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berpengaruh pada implementasi di lapangan.

Selain itu, pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan juga tidak dapat diabaikan. Masyarakat, termasuk orang tua dan komunitas, harus dilibatkan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pendidikan agar kebijakan yang diterapkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan solusi yang lebih efektif dapat ditemukan untuk mengatasi problematika pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep, R., Nurti, Q., & Qiqi. (2020). Model analisis kebijakan pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2).
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik pendidikan Indonesia*.
- Bustan. (2022). Problematika sistem pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 4(1).
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Effendy, M. (2019). Kebijakan pendidikan Indonesia: Perspektif dan implementasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. *Political Science Quarterly*.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. Sage Publications.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Laporan evaluasi program Merdeka Belajar*.
- Mardapi, D. (2018). Evaluasi kurikulum di Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Megawangi, R. (2004). Pendidikan berbasis karakter: Membangun generasi unggul. Institut Pertanian Bogor.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation*. University of California Press.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy. *Policy Studies Journal*, 8(4).
- Safitri Ulandari, dkk. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *Journal Homepage*, 6(1).
- Suhariadi, F., Sugiarti, R., Hardaningtyas, D., Mulyati, R., Kurniasari, E., Saadah, N., Yumni, H., & Abbas, A. (2023). Work from home: A behavioral model of Indonesian education workers' productivity during Covid-19. *Heliyon*, 9(3).
- Sumiati, T. (2011). Problematika pendidikan di Indonesia dan solusi pemecahannya. *Statement*, 1(1).
- Sutjipto, Prof. Dr., M.Si. (2017). Kajian infrastruktur pendidikan di daerah 3T. Universitas Negeri Jakarta.
- Suyanto, Prof. Dr., M.Ed. (2009). Masalah dan tantangan guru di era globalisasi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- UNESCO. (2018). *Global education monitoring report*.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process. *Administration & Society*.